

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

#### **1.1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan lingkungan hidup yang umumnya dihadapi di daerah perkotaan adalah pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah. Timbulnya pencemaran lingkungan hidup ini pada hakekatnya diakibatkan oleh manusia. Seharusnya sampah perlu dibuang dan dikelola dengan baik. Sedangkan tingkat pencemaran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penambahan jumlah penduduk, perubahan standar hidup, gaya hidup dan perilaku masyarakat.

Manajemen pengelolaan sampah dan limbah dibuang pada lahan yang sudah disediakan perlu tata kelola yang baik mengingat sampah dan limbah yang dihasilkan semakin bertambah cepat dan tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Sedangkan untuk pengelolaan sampah dan limbah tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit agar pengelolaan sampah tersebut terlihat efektif dan efisien.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur, membawa konsekuensi meningkatnya pola konsumsi dan berdampak positif terhadap kemakmuran rakyat. Tetapi ditinjau dari sudut lingkungan mempunyai dampak negatif karena mempercepat proses penggalan sumber daya alam juga meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan diantaranya adalah sampah, maka dari itu perlunya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pengangkutan sampah dan biaya tersebut akan dikelola untuk pengelolaan sampah dan limbah tersebut.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya

inovasi, tujuannya antara lain adalah untuk memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya terutama dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah menjadi tuntutan untuk meningkatkan PAD semakin besar. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya pemerintah daerah harus lebih kreatif. Dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku pada sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama (ismail 2008:39)<sup>1)</sup>.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik services) adalah salah satu tugas pokok pemerintah. Pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa public (charging for service) yaitu dua sumber pemberian pelayanan publik yang dapat dibiayai. Setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa public tersebut atau tidak, jika pelayanan publik dibiayai dengan pajak. Hal tersebut karena pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang tidak memiliki imbalan langsung kepada pembayar pajak. Masyarakat yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar jasa pelayanan publik tersebut, maka yang membayar hanyalah masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan publik melalui pembebanan langsung (retribusi).

Retribusi daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi menempati urutan kedua terbesar sebagai sumber PAD setelah pajak. Oleh karena itu peranannya menjadi penting sekali bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan rutinnya.

Retribusi daerah merupakan sumber keuangan yang cukup potensial untuk mendukung pembangunan daerah. Salah satu yang bersumber dari retribusi di Kota Administrasi Jakarta Timur adalah retribusi kebersihan. Hasil yang diperoleh

merupakan sumber pendapatan daerah yang berguna untuk biaya pengelolaan sampah mengingat prinsip dalam pengelolaan sampah adalah self financing artinya biaya pengelolaan sampah diperoleh dari retribusi sampah.

Pada umumnya masyarakat juga berkaitan dalam pemberlakuan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut retribusi daerah. Hal tersebut menunjukkan pada akhirnya memberikan beban kepada masyarakat dalam proses pemungutan retribusi daerah. Oleh sebab itu, agar masyarakat mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka masyarakat perlu memahami ketentuan retribusi daerah dengan jelas. Retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan penetapan tersendiri, yang kemungkinan berbeda dengan jenis retribusi daerah lainnya. Segala kondisi di atas memungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan retribusi daerah. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang retribusi daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas.

Pengelolaan retribusi kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Timur ternyata masih belum optimal untuk membiayai operasional pengelolaan kebersihan, dampak yang terjadi dalam pengelolaan maka penulis tertarik mengambil kajian tentang “ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur)

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan retribusi kebersihan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur?
2. Berapa target dan realisasi retribusi kebersihan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2015-2017?

3. Bagaimana dampak pengelolaan retribusi kebersihan terhadap PAD Kota Administrasi Jakarta Timur?
4. Faktor penghambat apa saja yang terjadi di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pengelolaan retribusi kebersihan?

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.2.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi kebersihan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui target dan realisasi retribusi kebersihan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2015 - 2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan retribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan retribusi kebersihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

### **1.2.2. Manfaat penelitian**

1. Bagi institusi, sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan retribusi kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Pemerintah Daerah Jakarta Timur, dapat menjadi masukan informasi dalam menentukan kebijakan untuk memperbaiki pengelolaan kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Disamping dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Jakarta Timur dalam menentukan kebijakan tarif retribusi kebersihan dengan peningkatan layanan ke masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta Timur.

3. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan bagi penulis, yaitu untuk memahami pengelolaan retribusi kebersihan terhadap peningkatan penerimaan asli daerah.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait. Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab 2 Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka teoritis penelitian dan memaparkan hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

#### **Bab 3 Metode Penelitian**

Bab ini berisi penjelasan mengenai sampel penelitian, operasional variabel, dan model penelitian.

#### **Bab 4 Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil pengolahan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis dalam menjawab hipotesis penelitian.

#### **Bab 5 Simpulan**

Bab ini berisi simpulan dari penelitian, saran, keerbatasan penelitian, dan pengembangan penelitian yang berikutnya.